

**HOTLINE REDAKSI**  
Telp. (0751) 25001-36923  
Fax. (0751) 33572  
email : singgalang.redaksi@gmail.com  
website : www.hariansinggalang.co.id  
epaper : epaper.hariansinggalang.co.id

# SINGGALANG

**INFO & PENGADUAN**  
Tlp. (0751) 25001-38338  
Fax. (0751) 811005  
Iklan : 08126605015  
Pemasaran : 085355173999  
Redaksi : (0751) 36923  
email: iklansinggalang@yahoo.co.id


Kamis, 16 Mei 2024 (8 Zulkaidah 1445 H)

16 Halaman (Dalam 2 Bagian)

**Rp5.000,-** Luar Kota + Ongkos Kirim

**Kamis, 16 Mei 2024**

### Jadwal Sholat



- Subuh 04.59
- Zuhur 12.16
- Ashar 15.41
- Maghrib 18.19
- Isya 19.31

**Support By:**  
**Ir. H. ALMAISYAR, AAIK, QIP, AMRP, M.M.**  
**DATUK BANGSO DIRAJO NAN KUNJANG**  
**INSYA ALLAH**  
**WALIKOTA PAYAKUMBUH 2024-2029**

**KOTA BERADAT**

**KHAIRUL IKHWAN**

DENGAN berpakaian preman, polisi menggrebek sejumlah emak-emak yang sedang asyik nongkrong di suatu tempat. Penggrebekan itu karena aparat kepolisian mendapatkan informasi tentang aktivitas melanggar hukum. Dan, benar saja. Tertangkap tangan, emak-emak itu sedang bermain judi remi. Video emak-emak tertangkap bermain judi itu viral. Sebenarnya, aksi polisi menggrebek aktivitas

**Bersambung ke A-7**

**Zakat Penghasilan**

Sumber yang bersih lebih aman, lebih berkah

**Salurkan Zakat Anda melalui:**

**mandi 111.000.500.4888**  
dan Dompet Cita-cita Singgalang

**BSI 234.2222.40**  
dan Dompet Cita-cita Republik

Informasi: (0752) 40098 & 081037023333



[www.dcsinggalang.org](http://www.dcsinggalang.org)

**Pojok**

- + Pemerintah abai sikap situasi Gunung Marapi - Biaso lah sudah cakak, silek takana mah...
- + Percepat bahas APBD-P untuk tanggulangi biaya bencana - Ncak mah Ketua, daripada nyo katoan abai lo dek kawan beko...

*Froggamel*



**PASCA BANJIR BANDANG** Sejumlah pelajar melintas di depan sekolah yang hancur akibat banjir bandang di Jorong Galudua, Nagari Koto Tuo, IV Koto, Kabupaten Agam, Rabu (15/5). Banjir bandang yang terjadi pada Sabtu (11/5) dari aliran sungai Gunung Singgalang itu juga mengakibatkan sejumlah bangunan dan fasilitas umum di kampung tersebut hancur. (Antara/iggyo el Fitra)

**WALHI SOAL MUSIBAH GALODO:**

# Pemerintah Lalai

**PADANG - SINGGALANG**

Kepala Departemen Advokasi Lingkungan Hidup Walhi Sumatera Barat Tommy Adam, menilai, pemerintah abai dan lalai dalam melihat persoalan yang sudah terjadi di kawasan Gunung Marapi, Sumatera Barat. Kata nya, lemahnya mitigasi dan kesiapsiagaan berimplikasi pada banyaknya korban jiwa yang berjatuhan.

"Kritik terhadap pemerintah, baik kabupaten atau provinsi,



Personel kepolisian bersama relawan membersihkan material kayu akibat banjir bandang di Jorong Pagu-pagu, Nagari Pandai Sikek, Tanah Datar. (Antara)

adalah bukan lemah, tapi abai dan lalai dalam melihat persoalan yang sudah terjadi di kawasan Gunung Marapi," kata Tommy, Rabu (15/5).

Ada sejumlah alasan yang membuatnya berpandangan seperti itu. Pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah sejak jauh hari mengingatkan tetnang kondisi cuaca ekstrem di Sumatera Barat, khususnya pada lokasi bencana. Kedua, adanya peringatan Pusat

**Bersambung ke A-7**

## Percepat Bahas APBD-P untuk Tanggulangi Biaya Bencana

**Padang, Singgalang**

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumbar tidak hanya menelan puluhan korban jiwa, namun juga kerusakan-kerusakan infrastruktur yang sangat parah. Berangkat dari hal itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi meminta gubernur untuk segera memba has proses Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024.



**SUPARDI**

Dengan dipercepatnya pembahasan Perubahan APBD 2024, maka langkah pemetaan untuk per baikan bisa segera dilakuan melalui pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Dalam pembahasan komposisi Perubahan APBD 2024, ada di dalamnya pos BTT yang diperuntukan untuk penanganan bencana alam. Pada APBD induk 2024, BTT dianggarkan tidak banyak. Jika pembahasan perubahan

**Bersambung ke A-7**

## Anggota DPR PDIP Usul Money Politics Dilegalkan



**HUGUA**

**JAKARTA** - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Huguha mengusulkan kepada KPU untuk melegalkan *money politics* atau politik uang dalam PKPU. Huguha menilai *money politics* perlu dilegalkan dengan batasan tertentu.

Hal itu disampaikan Huguha dalam rapat kerja KPU dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5). Huguha mengatakan *money politics* merupakan suatu keniscayaan dalam pemilu.

**Bersambung ke A-4**

## InJourney Group Bantu Korban Galodo Rp500 Juta



**BANTUAN** - Dony Oskaria serahkan Rp 500 juta bantuan bencana ke Wagub Sumbar Audy Joinaldy, Rabu (15/5) di VIP Room BIM. (ist)

**PADANG** - Dirut InJourney Dony Oskaria serahkan langsung bantuan bencana galodo Sumbar sebesar Rp 500 juta kepada Wagub Sumbar Audy Joinaldy, Rabu (15/5/2024) di VIP Room BIM.

"Sehari setelah kejadian, Satgas Gorila (Gunung Rimba dan Laut) sudah terjun ke lokasi bencana, dan lewat media Minggu sore nya InJourney Group merilis bantu bencana galodo sebesar Rp 500 juta," ujar Dony Oskaria.

**Bersambung ke A-7**

## KETUA KPU RI HASYIM ASY'ARI: Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada



**KETUA KPU RI**

**JAKARTA** - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa calon legislatif (caleg) terpilih di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikan Hasyim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Sebelumnya, dia menyatakan caleg ter

**Bersambung ke A-7**

**Prof. H. Ganefri, Ph.D**  
**Dt. Junjungan Nan Bagading**  
**(Rektor Universitas Negeri Padang)**

**SUMATERA BARAT MAJU**



Kamis, 16 Mei 2024 (8 Zulkaidah 1445 H)

Calon Terpilih 2024

**Caleg Terpilih ...**

pilih tak harus mundur bila maju pilkada.

Pernyataan ini sekaligus menjawab teka-teki mundur atau tidaknya anggota legislatif hasil pemilu 2024 bila ikut pilkada, yang pelantikannya terbilang mepet dengan pelaksanaan pilkada serentak 2024.

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Pilkada menentukan bahwa jika ada anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota didaftarkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri jabatannya.

"Pada dasarnya di UU Pilkada menentukan bahwa kalau ada anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota didaftarkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya. Ini bagi anggota," ujar Hasyim.

Katanya, bagi calon terpilih yang belum dilantik, pun yang bersangkutan harus tetap bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD walaupun belum dilantik.

"Jadi, kalau belum dilantik itu statusnya adalah sebagai calon terpilih. Maka apabila yang bersangkutan didaftarkan partai politik sebagai calon atau bakal calon kepala daerah

Calon Terpilih 2024

**Percepat Bahas ...**

APBD disegerakan maka bisa dilakukan penambahan untuk langkah perbaikan atau penanggulangan kerugian lainnya," kata Supardi, kemarin.

Ditegaskannya, perubahan APBD 2024 harus disegerakan mengingat kondisi saat ini.

Di sisi lain, dirinya meminta Pemprov Sumbar melakukan kajian jangka panjang yang melibatkan seluruh unsur terkait hingga perguruan tinggi dalam membahas lingkup kebencanaan. Untuk itu, peta kebencanaan Sumbar wajib harus ada.

"Tentunya peta kebencanaan itu harus dibuat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga langkah antisipasi dengan pemetaan-pemetaan yang dibuat bisa berjalan lebih optimal," katanya.

Dia juga meminta gubernur untuk melakukan evaluasi terkait eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Sumbar, baik itu sektor pertambangan hingga perkebunan. Eksploitasi yang tidak teratur akan sangat berpotensi untuk memicu terjadinya bencana alam.

"Dengan berbagai rentetan bencana alam yang terjadi maka harus ada langkah-langkah besar dari gubernur untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat," katanya.

Dia juga menyoroti maraknya pembangunan yang terletak di tepian Daerah Aliran Sungai (DAS), salah satunya di kawasan Lembah Anai. Dari awal semua telah memprediksi, DAS Lembah Anai yang dibangun berbagai wahana dan tempat usaha nantinya akan dipenuhi oleh debit air jika curah hujan tinggi.

Akhirnya sekarang dampaknya dirasakan, jalan pada daerah itu putus karena terjagan banjir.

"Jika ada peta kebencanaan maka harusnya daerah itu tidak bisa dibangun. Karena sekarang tidak adanya pemetaan itu secara kongrit, maka tidak ada kepatuhan-kepatuhan dalam pembangunan yang memperhatikan dampak

Calon Terpilih 2024

**Kota Beradat**

melanggar hukum itu adalah hal yang biasa. Di televisi, banyak tayangan penggrebekkan terduga pelaku kejahatan jalanan. Namun, video emak-emak bermain judi ini agak berbeda. Selain pelakunya adalah perempuan yang sudah nenek-nenek, mereka digrebek di Kota Padang yang terkenal dengan negeri matrilinel, di mana kaum perempuannya dikenal dengan bundo kanduang.

Tentu saja membuat heboh. Orang-orang tak habis pikir, bagaimana mungkin perempuan yang terpendang agung dan terhormat di Ranah Minang bisa melakukan perbuatan yang sangat buruk? Apakah perempuan-perempuan itu tak pernah dididik sebagai limpapeh? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjelaskan tentang ke jadian yang menghebohkan di Kota Padang itu.

Kota Padang memang sudah menjelma sebagai kota metropolitan. Mobilitas warganya sangat tinggi. Sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat sosial, Kota Padang kemudian menjadi rumah bagi semua orang. Kota ini multiras, multibudaya, multisuku, multistrata sosial. Pengaruh budaya asing, kebebasan informasi membuat warga kota mudah terpengaruh. Dan, mereka mudah pula tercerabut dari akar budayanya.
Milah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan emak-emak tertangkap berjudi itu lupa menjadi bundo kanduang. Barangkali, mereka justru tak tahu apa itu bundo kanduang. Tak tahu sama sekali dengan limpapeh rumah nan gadang. Kata tersebut, bisa jadi asing di telinga mereka. Kalau emak-emak yang sudah nenek-nenek saja tak kenal dengan jati diri mereka, bagaimana pula dengan perempuan-perempuan generasi sekarang? Sungguh, negeri ini sudah kehilangan sekian generasi perempuannya.

Secara awam, kekhawatiran tercerabutnya akar jati diri perempuan di negeri ini bisa dipertanyakan kepada perempuan milenial sekarang. Dalam kehidupan nyata, dengan mudah perempuan milenial itu menyebut: aku tidak bisa memasak. Bahkan, di Kota Padang, ada perempuan milenial yang ditanya tentang sukunya, ia sama sekali tak bisa menjawab. Apalagi, kalau ditanya, siapa mamaknya, siapa datuknya, makin mengerinyit keningnya.

Tertangkapnya emak-emak berjudi di Kota Padang bisa jadi adalah persoalan sepele. Tapi, persoalan sepele itu justru mendapat perhatian banyak orang. Sebab, kehilangan jati diri ini bukanlah persoalan sederhana. Ia menjadi fenomena gunung es yang memicu persoalan yang lebih besar. Memicu kriminalitas, konflik sosial, yang lebih memprihatinkan adalah terputusnya generasi perempuan Minang di Kota

# SAMBUNGAN

atau wakil kepala daerah maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri," jelasnya, seperti diwartakan Republika.co.id.

Adapun syarat atau dokumen yang diperlukan adalah dokumen pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD yang diserahkan paling lambat lima hari setelah penetapan pasangan calon (paslon) di Pilkada 2024.

Dokumen kedua adalah tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri tersebut. Kemudian, yang ketiga adalah surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Selain itu, Hasyim juga memberikan simulasi. Ia menuturkan dalam tahapan pilkada pendaftaran calon dilaksanakan tanggal 27-29 Agustus 2024.

Lalu, dilakukan penelitian administrasi verifikasi dan pada akhirnya ditetapkan sebagai paslon peserta pilkada itu pada tanggal 22 September 2024. Untuk anggota DPR DPD sebagaimana diketahui yang terpilih akan dilantik 1 Oktober 2024.

Begitu yang bersangkutan ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sebagai calon atau paslon peserta Pilkada 2024, maka yang bersangkutan harus segera mengajukan

Calon Terpilih 2024

lingkungan di masa depan," katanya.

Di sisi lain, dia mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati disaat kondisi cuaca yang tidak menentu (ekstrem-red), apalagi berbagai bencana alam terus mengintai seperti banjir hingga longsor. Ketika bepergian jauh, maka carilah jalur-jalur yang aman. Ketika bermukim pada daerah yang di dekat sungai atau perbukitan, maka mengungsilah terlebih dulu ke tempat saudara atau yang lainnya.

"Yang jelas, pemerintah akan terus mencarikan solusi-solusi terbaik untuk masyarakat agar bisa meminimalisir korban bencana alam," katanya.

Dia juga meminta unsur pemerintah nagari RT atau RW, memberikan rasa aman terhadap masyarakat dengan memberikan informasi-informasi kebencanaan yang akurat untuk langkah antisipasi atau penanggulangan. Dengan adanya koordinasi yang maksimal maka akan meminimalisir rasa khawatir masyarakat terkait apa yang akan terjadi ke depan.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat mengatakan meminta Gubernur Sumbar untuk segera menetapkan status keadaan darurat bencana, karena kejadian ini sudah mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Seperti diketahui, sebutnya, dampak dari bencana itu, telah menelan korban jiwa dan kerusakan sejumlah bangunan milik warga, sarana dan prasarana umum, hingga kerusakan lingkungan.

Meski dirinya setuju dengan tindakan gubernur meninjau lokasi terdampak bencana, namun persoalannya tidak hanya sampai disitu.

"Terpenting apa kebijakan yang akan diambil gubernur secara cepat dalam menghadapi dan menyikapi dampak bencana ini, karena gubernur punya kewenangan mengambil kebijakan dengan menetapkan status keadaan sesuai UU Nomor 24 tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana," tukas Anggota Komisi V DPRD Sumbar ini. **(401)**

Calon Terpilih 2024

Padang. Kalau di suatu negeri perempuannya sudah rusak, maka rusaklah negeri tersebut.

Inilah akibat ketika akar budaya, jati diri hanya dianggap sebagai persoalan sepele. Banyak perempuan yang terlepas dari citra jati dirinya. Banyak perempuan di Kota Padang yang tak tahu lagi bagaimana berlaku sebagai pe rempuan Minang sejati. Semua ini bermula keti ka perkara adat dan budaya dipandang sebelah mata.

Kota Padang memang sudah mempunyai pengajaran adat dan budaya. Adat dan budaya Minang menjadi muatan lokal yang diajarkan di bangku sekolah. Daripada tidak sama sekali, pengajaran adat dan budaya di sekolah itu memang patut diapresiasi. Tapi, untuk menjadi kan adat dan budaya sebagai jati diri, jalan hidup, identitas, tak cukup dengan pelajaran di sekolah saja.

Implementasi adat dan budaya Minang itu harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Membentuk karakter masyarakat, membentuk pribadi-pribadi yang hidup dalam masyarakat tersebut. Karena itulah, implementasi adat dan budaya itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi menjadi tanggung jawab semua institusi yang ada di masyarakat, terutama keluarga.

Hal yang paling mendasar adalah, akar adat dan budaya Minang itu ada pada falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Akar falsafah hidup inilah role dalam kehidupan sehari-hari. Falsafah hidup yang menggerakkan fungsi bundo kanduang, ninik mamak, cadiak pandai, alim ulama; tigo tungku sajarangan.
Mewujudkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah bukanlah perkara yang mudah. Apalagi, dalam masyarakat kota yang sudah tergerus jati diri karena pengaruh bermacam nilai. Karena itulah, menjadikan Kota Padang sebagai kota beradat merupakan sebuah visi yang sangat besar.

Padang sebagai kota beradat bagi orang-orang yang sinis barangkali dianggap sebatas primordial, ketinggalan zaman. Tentu saja, itu adalah pemahaman yang salah terhadap falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Falsafah ABSSBK adalah jalan hidup. Sesuai dengan prinsipnya, falsafah ABSSBK itu tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan.

Sudah saatnya, implementasi adat dan budaya itu tak lagi bersifat primordial, apalagi sekadar formalitas dan seremonial. Visi Padang kota beradat adalah menjadikan adat dan budaya yang berakar pada falsafah ABSSBK sebagai jalan hidup, jati diri, role mode. Dengan begitu, perempuan-perempuan di kota ini akan menjadi limpapeh yang sebenarnya. Laki-lakinya, menjadi ninik mamak, urang sumando, jadi anak-kemenakan yang sebaik-baiknya. **(\*)**

surat pengunduran diri sebagai calon terpilih.

"Jadi supaya jelas jalur yang ditempuh apakah menjadi calon kepala daerah atau menjadi anggota DPR atau DPD. Kurang lebih simulasi-nya demikian," pungkas Hasyim.

Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

- Pada tanggal 27 Februari-16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
- Pada tanggal 24 April-31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
- Pada tanggal 5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
- Pada tanggal 31 Mei-23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

Calon Terpilih 2024

**InJourney Group ...**

Wagub Sumbar Audy Joinaldy mengucapkan terima kasih atas bantuan cepat dari InJourney itu.

"Bencana galodo ini merusak parah dan korban jiwanya banyak, yang terparah itu infrastruktur dan ini butuh cepat dipulihkan," ujar Wagub Audy Joinaldy.

Wagub Sumbar Audy Joinaldy mengatakan, bencana di Sumbar beruntun. Seperti jelang Ramadhan lalu, bencana Pessel dengan cakupan daerah terdampaknya lebih luas.

"Bencana banjir bandang meski area bencana kecil dari Pessel tapi korban jiwa lebih banyak dari bencana Pessel. Korban bencana galodo lebih banyak karena kejadian malam, sedangkan Pessel kejadian siang," ujar Audy.

Audy pada bencana beruntun, pernah merasakan horornya banjir lahar dingin. "Saya berpikir sopir salah jalan, kok masuk sungai, ee ternyata banjir lahar dingin," ujar Audy sat ekspose bencana Sumbar kepada Dirut InJourney Dony Oskaria dan rombongan.

Ya, bencananya Sabtu 11 Mei 2024 malam,

Calon Terpilih 2024

**Pemerintah ...**

Vulkanologi & Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terkait potensi banjir lahar dingin.

"Lalu adanya kejadian bencana lahar dingin yang sebelumnya sudah terjadi di Agam dan Tanah Datar pada 5 April 2024. Tidak ada respon atas tiga hal di atas, misal upaya pemindahan orang dari lokasi rawan bencana, atau pemasangan alat deteksi dini banjir bandang atau early warning," kata Tommy.

Dia mengatakan, semua pihak tentu berduka dengan atas apa yang sudah terjadi. Tapi, kata dia, tetap harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimbulkan puluhan korban jiwa tersebut. Apa yang terjadi, kata dia, menjadi bukti lemahnya mitigasi dan kesiapsiagaan yang berimplikasi terhadap banyaknya korban jiwa.

"Atas kejadian yang terjadi sekarang pemerintah harus memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang terdampak, air bersih, makanan pokok, kesehatan, dan lainnya," jelas dia, seperti diwartakan Republika.co.id.

Dia menambahkan, berkaca pada kasus bencana sebelumnya di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, ketika pascabencana banyak yang meninggal karena diare. Dia ingin hal itu tak kembali terulang di penanganan bencana kali ini.

"Tanggung jawab pemerintah tidak hanya pada kondisi tanggap darurat, tapi juga pada saat pra bencana yang tidak siap dan siaga," terang dia.

Calon Terpilih 2024

**Modifikasi Cuaca**
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Sumatera Barat mulai Rabu (15/5).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Ph.D, mengatakan, operasi Teknologi Modifikasi Cuaca ini dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penanganan darurat bencana banjir bandang lahar dingin dan tanah longsor yang terjadi di beberapa Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Teknologi modifikasi cuaca ini sangat diperlukan guna mendukung proses evakuasi dan perbaikan sarana dan pra sarana yang ada . Hal ini dilakukan agar proses penanganan darurat yang dilakukan bersama berbagai instansi tidak terhambat dan terkendala oleh cuaca buruk yang terjadi, mengingat kondisi cuaca di wilayah Sumb ar yang menurut BMKG masih berpotensi hujan ringan hingga hujan lebat.

"Operasi TMC di Sumbar dilaksanakan atas koordinasi BNPB, BMKG, TNI AU, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak pihak terkait lainnya, BNPB akan menggunakan pesawat tipe Grand Caravan 208 C dengan nomor lambung PK-SNN dari Bandar Udara Minangkabau," katanya.

Pada hari ini operasi TMC direncanakan dilakukan sebanyak 2 sortie penerbangan yang akan dimulai pada pukul 13.30 WIB dengan membawa 1 ton Natrium Klorida (NaCl) pada setiap sortie nya, sehingga total bahan semai untuk operasi TMC Sumatera Barat hari ini adalah 2 ton.

Seb elumnya, BNPB menyiapkan sejumlah solusi penanganan bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor yang menerjang sejumlah daerah di Sumatera Barat, Sabtu (11/5) lalu. Solusi tersebut dihadirkan menyusul dampak kerusakan yang diakibatkan dari bencana tersebut tergolong besar.

Hal ini disampaikan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, usai meninjau enam titik lokasi terdampak yakni Bukik Batabuah Kabupaten Agam, X Koto Pandai Sikek, Lubuak Mato Kuciang, Lembah Anai, Simpang Manung gal, dan Jorong Panti Kabupaten Tanah Datar. Peninjauan tersebut dilakukan pada hari kedua kunjungan kerja Kepala BNPB, Selasa (14/5).

Suharyanto menyampaikan, pemerintah menargetkan proses penanganan darurat dapat berjalan optimal dan cepat. Sehingga lokasi terdampak dapat segera pulih dan kembali normal.

Sementara itu, data mutakhir berdasarkan laporan Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB hari ini per pukul 18.35 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat 58 orang, sementara korban hilang bertambah dari 27 menjadi 35 orang dalam pencarian. Selain itu, untuk keluarga terdampak berjumlah 1.543 KK dan 33 orang mengalami luka-luka. Pusdalops dan BPBD setempat masih terus melakukan pengkajian dan pemutakhiran data menyuksul masih dilaksanakannya proses pencarian dan evakuasi korban.

5. Pada tanggal 24-26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. Pada tanggal 27-29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

7. Pada tanggal 27 Agustus-21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

9. Pada tanggal 25 September-23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;

10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan

11. Pada tanggal 27 November-16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Calon Terpilih 2024

Calon Terpilih 2024

dimana galodo dahsyat menerpa Sumbar. Korban berjatuhan. Banyak rumah warga porak-poranda dan jalur Lembah Anai putus total. Kini, lalu lintas Padang-Bukittinggi dialihkan ke ruas Malalak dan Sitinjau Lauik.

Dony Oskaria usai penyerahan bantuan InJouney Group juga menginfokan bahwa bantuan berikutnya dari banyak BUMN di Indonesia.

"Perusahaan milik negara lewat BUMN peduli juga sangat antusias bantu becana galodo Sumbar," ujar Dony.

Audy Joinaldy kepada wartawan menyenta kan, kerugian materil atas bencana Sumbar masih dihitung. "Kita belum mau menyampaikan perkiraan kerugian, semua tengah diinput dulu. Karena semua data kerugian dampak galodo harus didata dan harus valid," ujarnya.

Namun yang pasti, kerugian infrastruktur jalan terutama di Lembah Anai, menurut Wagub bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

"Itu jalan gak bisa dilewati sudah jebol, untukantisipasi Pemprov sudah minta ke Kementerian PUPR untuk bangun jalan darurat," ujar Audy.

Calon Terpilih 2024

Ia menyampaikan, selain pengerahan alat berat untuk membantu menormalisasi kondisi dan pembersihan materil banjir dan longsor di area permukiman, ia juga mendorong agar terus dilakukan pendataam terhadap rumah, yang mengalami kerusakan baik rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.

"Hari ini ada empat lokasi untuk kami lihat langsung agar kemudian bisa ditentukan langkah-langkah selanjutnya. Juga dilakukan pendataan kerusakan mulai dari rumah, fasos, fasum agar bisa segera ditindaklanjuti untuk diperbaiki dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," tambah Suharyanto.

**Perbaikan Jalur Transportasi**

Guna mengoptimalkan pendistribusian bantuan logistik ke enam daerah terdampak BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong percepatan perbaikan sejumlah jalan nasional yang terputus dan jembatan yang rusak. Akses terputus dan jembatan yang rusak tersebut di antaranya meliputi Jalan Akses Simpang di Kota Padang Panjang dan 19 unit jembatan terdampak.

Menyusul hal tersebut, bantuan logistik bagi masyarakat dikirimkan melalui jalur udara menggunakan helikopter BNPB, khususnya di daerah Kabupaten Tanah Datar.

"Transportasinya sulit dan ada enam kabupaten dan kota yang terdampak jadi perlu pembagian waktu yang tepat (untuk distribusi bantuan). Tadi kita lihat yang paling parah di Lembah Anai, itu masih ada yang terputus semoga dalam waktu dekat sudah bisa dilalui alat transportasi karena dari PUPR tadi sudah bergerak alat berat dikerahkan," terang Suharyanto.

Calon Terpilih 2024

**Operasi TMC**

Sebagai salah satu upaya percepatan penanganan darurat bencana banjir bandang lahar dingin dan tanah longsor, BNPB bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan melaksanakan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Operasi TMC digelar guna mendukung proses evakuasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada. Sehingga penanganan darurat tidak terhambat oleh cuaca buruk yang masih berpotensi terjadi sesuai prakiraan oleh BMKG untuk wilayah Sumatra Barat.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, TMC akan disiapkan bersama antara BMKG dan BNPB. Dwikorita mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan dan memperhitungkan jumlah sortie yang akan dilakukan dengan melihat dinamisnya cuaca yang ada. Persiapan dilakukan untuk operasi selama tujuh hari ke depan.

"Untuk TMC masih kami hitung (berapa sortie) tapi kami akan siapkan kurang lebih untuk periode sekitar enam sampai tujuh hari. Nah berapa sortie-nya tergantung pertumbuhan awan, maka biasanya tadi bisa sampai 4 bahkan 11 sortie pernah kami lakukan tapi tidak selalu tergantung pertumbuhan awan tadi. Tapi kalau untuk pesawatnya kita siapkan sampai tanggal 22 Mei 2024," terangnya.

**Relokasi Rumah Terdampak**

Selain perbaikan sarana dan prasarana, pemerintah juga terus mengupayakan penanganan terbaik bagi para warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana banjir tersebut. Salah satu alternatif yang disiapkan adalah dengan cara relokasi rumah khususnya yang rusak dan berada di dekat aliran sungai.

Adapun untuk rumah yang mengalami kerusakan akan diberikan bantuan stimulan rumah rusak dengan rincian nilai di antaranya Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp15 juta untuk rusak ringan.

"Untuk relokasi kami sedang asesmen, kami sudah memberikan rekomendasi di tahap transisi rehabilitasi rekonstruksi apakah ada relokasi, kalau ada relokasi maka pemerintah daerah menyiapkan lahan dan pemerintah pusat yang akan bangun. Bila tidak direlokasi, maka kami akan siapkan opsi lain seperti perbaikan," jelas Suharyanto.

Upaya-upaya yang dilakukan sebagai percepatan penanganan darurat yang dilakukan oleh pemerintah bersama para stakeholder terkait ini bertujuan agar masyarakat dapat kembali memulai kehidupan dan penghidupannya sesegara mungkin. "Rata-rata status tanggap darurat ini kan 14 hari, ini waktu yang cukup panjang jadi kita ingin melaksanakan secepat mungkin dari darurat ke rehabilitasi karena 14 hari ini bagi masyarakat cukup lama," kata Suharyanto.**(109)**





## DPRD Sumbar Optimalkan Penyusunan Rekomendasi untuk LKPJ Tahun 2023

JAKARTA - SINGGALANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus mengoptimalkan pembahasan dan penyusunan rekomendasi untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2023.

Panitia khusus pembahasan LKPJ tersebut telah melakukan konsultasi ke Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan Hubungan antar Lembaga (FKDH) kementerian dalam negeri (Kemendagri), Senin (13/5).

Sebelumnya, komisi-komisi di DPRD Sumbar juga telah melaksanakan rapat bersama mitra kerja untuk membahas LKPJ yang telah diserahkan gubernur ke DPRD tersebut.

Saat pertemuan di Kemendagri, dalam pertemuan itu terungkap, Pansus LKPJ DPRD Sumbar akan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi yang diberikan kepada Gubernur pada tahun-tahun sebelumnya yakni Tahun 2019 hingga 2022.

Ketua Pansus, Desrio Putra mengatakan dalam pembahasan LKPJ tahun 2023, Pansus tidak hanya berfokus membahas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah saja. Namun juga mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun-tahun sebelumnya sehingga bisa dilihat bagaimana dampak yang diberikan.

"Upaya ini tentu dilakukan untuk lebih memperbaiki jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah," katanya.

Di dalam pertemuan itu, Desrio berharap kualitas reko-



mendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2023 dapat lebih meningkat dan fungsi pengawasan dapat lebih optimal.

Sementara itu, terkait rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah, DPRD menilai apakah perlu menggunakan hak interpretasi agar pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan maksimal.

Desrio mengatakan, dalam pembahasan LKPJ Kepala Daerah, DPRD akan berfokus dalam fungsi pengawasan, bahkan kewenangan itu diberikan sangat luas. Untuk itu penyatuan frekuensi dalam melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategis sangat diperlukan. Termasuk mengambil langkah-langkah dalam menyatakan sikap terhadap LKPJ Kepala Daerah.

Dia menyebutkan, dalam capaian kinerja yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan OPD dalam buku LKPJ, bisa jadi berbeda dengan pelaksanaan hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Apa yang dicantumkan pada buku LKPJ lebih banyak dalam bentuk makro dan capaian secara umum. Sedangkan dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD lebih cenderung melihat permasalahan secara lebih detail.

"Hal itu harus menjadi perhatian seluruh pihak termasuk

Pemprov agar bisa tercapai optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah," katanya.

Pada pertemuan itu Pansus DPRD disambut Direktorat FKDH Wilayah I Sumatera, Eka Sastra. Tidak hanya itu Pansus LKPJ juga didampingi unsur pimpinan yaitu Wakil Ketua DPRD Irsyad Syafar, Indra Dt Rajo Lelo dan Suwirpen Suib.

Eka Sastra mengatakan jika rekomendasi yang diberikan DPRD kepada Kepala Daerah tidak ada progres, maka harus dikoordinasikan dengan komisi. Masa kerja Pansus selama enam bulan, maka pamanggilan OPD harus dilakukan dengan mengorek apa yang harus menjadi perhatian sebagai bahan rekomendasi.

"Sorotan-Sorotan itu harus ditindaklanjuti dengan komisi-komisi terkait untuk mengawal progres yang ada," katanya.

Ia mengatakan dengan adanya LKPJ, DPRD bisa memonitor kinerja kepada daerah.

"Sejatinya LKPJ adalah bahan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik. Menurutnya PP13 tahun 2019, semua harus berjalan sesuai koridor," ujar Eka.

Untuk diketahui, DPRD Sumbar telah menggelar rapat paripurna, dengan agenda Pen-

yampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Sumbar tahun anggaran 2023, Senin (25/3).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar didampingi Wakil Ketua Suwirpen Suib dan Sekretaris DPRD Sumbar Raelis. Sementara dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri Wagub Audy Joinaldy.

Irsyad Safar menyampaikan bahwa sesuai ketentuan pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD.

"Hal tersebut juga diatur secara khusus dalam Pasal 19 pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam aturan itu disampaikan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir," ujar Irsyad.

Irsyad mengatakan, LKPJ Kepala Daerah Sumbar Tahun 2023, merupakan LKPJ ketiga Gubernur Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2021-2024. Ini juga merupakan pelaksanaan dari RPJMD Sumbar Tahun 2021-2026.

"Dengan demikian hanya

tinggal satu LKPJ lagi yang akan disampaikan Gubernur kepada DPRD, yaitu LKPJ Tahun 2024. LKPJ itu ekaligus berfungsi sebagai LKPJ akhir masa jabatan," kata Irsyad.

Kemudian lanjut Irsyad, DPRD sebagai institusi yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu melihat secara lebih tajam LKPJ Tahun 2023 ini.

Mesti diperhatikan sudah sampai sejauhmana capaian kinerja Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai pada tahun 2023. Selain juga ada permasalahan yang dihadapi dan bagaimana solusi yang diambil untuk penyelesaian permasalahan tersebut.

"Capaian kinerja tersebut, tidak hanya dilihat dari realisasi anggaran dan capaian target dalam bentuk angka-angka statistik saja. Namun juga perlu dilihat bagaimana kondisi riil di tengah-tengah masyarakat serta dampak pelaksanaan kegiatan tersebut terhadap daerah dan masyarakat," ujar Irsyad.

Sementara itu, komisi-komisi di DPRD Sumbar telah selesai melaksanakan rapat dengan mitra kerja untuk membahas LKPJ tersebut.

Komisi I bidang pemerintahan, Komisi II bidang ekonomi, Komisi III bidang keuangan, Komisi IV bidang pembangunan dan Komisi V bidang kesejahteraan masyarakat. (\*)

